

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG**

SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran
 - 3.1.1. Pendapatan LRA
 - 3.1.2. Belanja
- 3.2. Penjelasan pos-pos laporan Operasional
- 3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 3.4.1. Aset
 - 3.4.2. Kewajiban
 - 3.4.3. Ekuitas

Bab IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Bab V : PENUTUP

Lumajang, 31 Desember 2020

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LUMAJANG

Sebagai Pengguna Anggaran / Barang



DADANG A PRESTIAWAN, SSTP, M.AP

NIP. 19800227 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN JENDRAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467
LUMAJANG - 67314

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ;
2. Laporan Operasional (LO) ;
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ;
4. Neraca ; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, 31 Desember 2020

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Selaku Pengguna Anggaran / Barang

DADANG A PRESTIAWAN, SSTP, M.AP

NIP. 19800227 199912 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
 - ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

	SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
	3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2020 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	6.684.963.734	5.857.257.694	87,62	827.363.480
2	Belanja Modal	11.264.990	11.264.900	100,00	90
	Jumlah Belanja	6.696.228.724	5.868.522.594	87,64	827.363.570

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel II Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 - 2020

Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	2.398.594.096	889.681.215	2.190.651.230	2.456.439.217	2.380.199.131
Belanja Barang	2.693.105.966	5.548.780.095	6.230.474.017	4.354.363.667	3.477.058.563
Belanja Hibah	0	0	26.000.000	0	0
Belanja Modal	112.222.000	179.903.800	212.304.800	581.342.300	11.264.900
Jumlah	5.203.922.062	6.618.365.110	8.659.430.047	7.392.145.184	5.868.522.594
% Kenaikan					

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program	: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
Kegiatan	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	60.118.000	59.479.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Uang Lembur

- Belanja Barang & Jasa	2.819.584.500	2.129103.498	Belanja Barang dan Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor (telepon,air,listrik) c. Belanja Premi Asuransi d. Belanja Cetak dan Penggandaan e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Pakaian Khusus hari-hari tertentu g. Belanja Perjalanan Dinas h. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja i. Belanja Alat Rumah Tangga
- Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
Kegiatan	: Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal	11.264.990	11.264.900	Belanja Modal Meliputi : a. Belanja Modal Alat Kantor b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Program	: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	111.924.610	92.230.165	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor b. Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga c. Belanja Pemeliharaan Komputer d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal

Program	:PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	460.000	0	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan b. Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	:PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	200.000	0	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	408.000	408.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan b. Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Kegiatan	: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.495.000	1.495.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	1.005.000	1.005.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Cetak dan Penggandaan b. Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal

Program	: PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.350.000	1.350.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	135.294.000	133.764.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan / Material b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Tempat e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Perjalanan Dinas g. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja h. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	38.675.000	38.675.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan / Material b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Tempat e. Belanja Sewa Sarana Mobilitas f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan g. Belanja Makanan dan Minuman h. Belanja Perjalanan Dinas i. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Kerjasama Lembaga Ekonomi Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai

Belanja Barang & Jasa	14.225.000	14.200.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Jasa Kantor b. Belanja Cetak dan Penggandaan c. Belanja Makanan dan Minuman d. Belanja Perjalanan Dinas e. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
Kegiatan	: Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	3.500.000	3.500.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan / Material b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Perjalanan Dinas g. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja h. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.011.000	1.011.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	194.361.250	184.672.200	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Jasa Kantor b. Belanja Cetak dan Penggandaan c. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan d. Belanja Makanan dan Minuman e. Belanja Perjalanan Dinas f. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal

Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan PKK		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.040.000	1.040.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	334.842.000	299.821.500	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan / Material b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Perjalanan Dinas g. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
Kegiatan	: Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	506.250	506.250	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS
Belanja Barang & Jasa	22.250.000	21.425.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Jasa Kantor b. Belanja Cetak dan Penggandaan c. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan d. Belanja Makanan dan Minuman e. Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		
Kegiatan	: Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	127.810.000	125.550.500	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Bahan / Material b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Rumah/Gedung / Gudang/Parkir/ Tempat e. Belanja Sewa Sarana Mobilitas f. Belanja Makanan dan Minuman g. Belanja Perjalanan Dinas h. Belanja Barang dan/atau Uang

			yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA		
Kegiatan	: Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	3.262.000	3.242.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	95.547.000	92.846.000	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Jasa Kantor b. Belanja Cetak dan Penggandaan c. Belanja Makanan dan Minuman d. Belanja Perjalanan Dinas e. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA		
Kegiatan	: Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	21.011.000	20.982.000	Belanja Pegawai Meliputi : a. Belanja Honorarium PNS b. Belanja Uang Lembur
Belanja Barang & Jasa	374.201.500	339.857.700	Belanja Barang & Jasa Meliputi : a. Belanja Pakai Habis b. Belanja Jasa Kantor c. Belanja Cetak dan Penggandaan d. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan e. Belanja Makanan dan Minuman f. Belanja Perjalanan Dinas g. Belanja Upah / Ongkos Tenaga Kerja h. Belanja Barang dan/atau Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal
Program	: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA		
Kegiatan	: Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan

Belanja Pegawai	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal	0	0	Tidak Ada Anggaran Belanja Modal

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	1.188.101.082,00	1.708.750.905,88	1.576.799.263,06	2.163.398.945,06	1.668.388.688,59
2. Kewajiban	1.807.879,00	4.340.446,00	91.334.348,00	69.633.041,00	62.008.667,00
3. Ekuitas	1.186.293.203,00	1.704.410.459,88	1.485.464.915,06	2.093.765.904,06	1.606.380.021,59
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.188.101.082,00	1.708.750.905,88	1.576.799.263,06	2.163.398.945,06	1.668.388.688,59

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya mencakup belanja-LRA, karena bukan merupakan SKPD penghasil.

3.1.1 BELANJA

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
a. Belanja Daerah	6.696.228.724,00	5.868.522.594,00	7.392.145.184,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp 5.868.522.594,00 Realisasinya mencapai 87,64% dari anggaran sebesar Rp 6.696.228.724,00 Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja Tahun 2020 turun 2,90% Realisasi belanja 2019 sebesar Rp. 7.392.145.184 mencapai 90,54%

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
1) Belanja Operasi	6.684.963.734,00	5.857.257.694,00	6.810.802.884,00

Belanja operasi pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel : 3.1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	2.410.675.874,00	2.380.199.131,00	98,72	2.456.439.217,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.274.287.860,00	3.477.058.563,00	81,36	4.354.363.667,00
3	Hibah	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	6.684.963.734,00	5.857.257.694,00	87,62	6.810.802.884,00

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	2.410.675.874,00	2.380.199.131,00	2.456.439.217,00

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai,

sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel : 3.2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.320.882.624	2.291.093.881	98,72	2.259.740.717
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	1.199.735.684	1.195.791.123	99,67	1.178.561.813
2	Tunjangan keluarga	98.426.469	98.070.308	99,64	104.097.692
3	Tunjangan jabatan	138.190.000	137.455.000	99,47	150.030.000
4	Tunjangan fungsional umum	20.670.000	20.660.000	99,95	22.055.000
5	Tunjangan beras	54.309.195	54.097.740	99,61	53.590.800
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2.229.975	2.087.391	93,61	2.789.184
7	Pembulatan gaji	16.325	14.627	89,60	15.389
8	Iuran Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	10.642.725	9.752.575	91,64	9.689.883
9	Tunjangan uang makan	0	0	0,00	0
10	Tambahan Penghasilan Pegawai	796.662.251	773.165.117	97,05	738.910.956
11	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	2.320.882.624	2.291.093.881	98,72	2.259.740.717
	BELANJA LANGSUNG				5.141.919.467
1	Honorarium PNS	68.877.250	68.252.250		79.165.500
2	Honorarium Non PNS	0	0		40.500.000
3	Uang lembur PNS	20.916.000	20.853.000		77.002.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	89.793.250	89.105.250		196.698.500
	Jumlah Belanja Pegawai	2.410.675.874	2.380.199.131		2.456.439.217

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) BelanjaBarang dan Jasa	4.274.287.860	3.477.058.563	4.354.363.667

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel : 3.3. Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	722.500.450	634.102.050	1.361.890.131
2	Belanja Jasa	2.936.315.800	2.250.697.420	1.883.916.032
3	Belanja Pemeliharaan	111.924.610	92.230.165	113.020.784
4	Belanja Perjalanan Dinas	503.547.000	500.028.928	985.656.720
5	Belanja Lainnya	0	0	880.000
	Jumlah	4.274.287.860	3.477.058.563	4.354.363.667

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 634.102.050,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Persediaan tahun 2020

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	54.418.000	53.647.000
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	4.959.000	4.829.000
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	5.610.000	4.533.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.996.525	4.940.450
5	Belanja Cenderamata	0	0
6	Belanja Spanduk/Baliho/Banner	10.550.000	4.431.000
7	Belanja bahan baku praktek/pelatihan	5.226.000	5.226.000
8	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	1.786.000	1.786.000
9	Belanja cetak	64.188.675	61.629.000
10	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	23.424.000	20.338.400
11	Belanja makanan dan minuman rapat	474.162.250	404.632.200
12	Belanja makanan dan minuman tamu	7.680.000	4.869.500
13	Belanja pakaian olah raga	0	0
14	Belanja pakaian Batik Tradisional	0	0
15	Belanja hadiah barang	0	0
16	Belanja hadiah Uang	0	0
17	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	65.500.000	63.240.500
	Jumlah	722.500.450	634.102.050

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 2.250.697.420,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5. : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja telepon	3.000.780	664.497
2	Belanja air	4.000.000	1.170.350
3	Belanja listrik	31.800.000	30.612.948
4	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000	1.680.000
5	Belanja kawat/faksimili/internet	54.000.000	50.102.261
6	Belanja paket/pengiriman	300.000	90.210
7	Belanja dokumentasi	3.036.000	3.036.000
8	Belanja dekorasi	13.412.500	12.042.500
9	Belanja Jasa Promosi / Publikasi / Advertising	5.600.000	5.600.000
10	Belanja Jasa Gelombang Radio / Televisi	600.000	600.000
11	Belanja penggantian transport	143.960.000	142.360.000
12	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	111.050.000	109.050.000
13	Belanja jasa pendukung kegiatan	18.250.000	18.250.000
14	Belanja jasa juri/wasit	0	0
15	Belanja jasa event organizer	0	0
16	Belanja jasa pembuatan video	0	0
17	Belanja retribusi pelayanan persampahan	600.000	600.000
18	Belanja premi asuransi kesehatan	1.792.532.340	1.127.934.955
19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	4.239.180	2.746.699
20	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000	9.000.000
21	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	0
22	Belanja sewa penginapan	0	0
23	Belanja sewa sarana mobilitas darat	3.000.000	3.000.000
24	Belanja sewa meja dan kursi	24.300.000	23.780.000
25	Belanja sewa alat studio	2.500.000	2.500.000
26	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	17.550.000	17.550.000
27	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	667.600.000	664.200.000
28	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	0	0
29	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	24.305.000	24.127.000
	Jumlah	2.936.315.800	2.250.697.420

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 92.230.165,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	52.005.000	32.481.065
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku	18.101.610	18.101.500

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
	cadang		
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	8.100.000	7.979.600
4	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000	3.000.000
5	Belanja pemeliharaan alat pendingin	4.500.000	4.500.000
6	Belanja pemeliharaan personal komputer	8.750.000	8.750.000
7	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	7.500.000	7.500.000
8	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	9.968.000	9.918.000
	Jumlah	111.924.610	92.230.165

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 500.028.928 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	394.175.000	391.950.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.372.000	108.078.928
	Jumlah	503.547.000	500.028.928

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 0 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.8 : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja alat dapur	0	0
	Jumlah	0	0

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(c) Belanja Modal	11.264.990,00	11.264.900,00	581.342.300,00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2020

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.264.990	11.264.900	99,99	394.595.500
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	74.747.000
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	111.999.800
	Jumlah	11.264.990	11.264.900	99,99	581.342.300

Berdasarkan Table Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2020 belanja modal peralatan dan mesin naik sebesar 4,19 % dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2019.

Rincian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu :

- a. Belanja Dispenser seharga Rp. 1.474.900,-
- b. Belanja Lemari Kaca / Etalase seharga Rp. 1.600.000,-
- c. Belanja Proyektor dan Layar Rp. 8.190.000,-

2. Pada Tahun 2020 belanja modal gedung dan bangunan turun sebesar 100 % dari realisasi belanja modal gedung kantor tahun 2019.
3. Pada Tahun 2020 belanja modal aset tetap lainnya turun sebesar 100 % dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2019.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.10: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	12.344.350	10.379.382
Jumlah	12.344.350	10.379.382

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11 Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2020 dan 2019

1. Saldo 31 Desember 2019		0
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	350.000.000	
- SP2D TUP	396.944.500	
- SP2D GU	1.211.094.697	
- Penerimaan PFK	0	
Jumlah Penerimaan		1.958.039.197
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	1.211.094.697	
- SPJ GU Nihil	96.589.921	
- SPJ TU Nihil	285.263.705	
- Setor kembali sisa TUP	111.680.795	
- Setor kembali sisa UP/GU	253.410.079	
- Pengeluaran PFK	0	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0	
Jumlah pengeluaran		1.958.039.197
4. Saldo 31 Desember 2020		0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8) Persediaan	<u>12.344.350,00</u>	<u>10.379.382,00</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.12 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2019	10.379.382
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	10.379.382
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2020	634.102.050
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0
7	Belanja Persediaan BOS	0

No	Uraian	Jumlah
8	Penerimaan hibah persediaan	0
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	634.102.050
10	Dikurangi :	
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2018	0
12	Pengeluaran hibah persediaan	0
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan	644.481.432
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	(632.137.082)
16	Persediaan tahun 2020 (14+15)	12.344.350

Tabel 3.13 Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	6.533.350	5.834.500
2	Persediaan Barang cetakan	5.661.000	4.490.882
3	Persediaan Materai	150.000	54.000
	Jumlah	12.344.350	10.379.382

b. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>1.413.920.458,59</u>	<u>1.610.083.019,97</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	705.695.000,00	-	-		705.695.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.004.727.827,00	-	11.264.900,00		2.015.992.727,00
3	Gedung dan Bangunan	671.622.000,00	-	-		671.622.000,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	0,00	-	-		0,00
5	Aset Tetap Lainnya	650.000,00	-	-		650.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	-	-		0
7	Akumulasi Penyusutan	(1.772.611.807,03)	0	-		(1.980.039.268,41)
	Jumlah	1.610.083.019,97		11.264.900,00		1.413.920.458,59

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut :

- Koreksi kurang catat Rp. 0 atau dapat dikatakan NIHIL
- Koreksi lebih catat Rp. 0 atau dapat dikatakan NIHIL

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 11.264.900 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp 11.264.900;
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp. 0
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp 0
 - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp 0 meliputi:
- (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp 0
 - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp 0
 - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp 0 dan
 - (5) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp 0

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Tanah	<u>705.695.000,00</u>	<u>705.695.000,00</u>

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 705.695.000 dan Rp. 705.695.000 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.15 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	705.695.000	0	0	0	705.695.000
2	Tanah B					
3	Tanah C					
4	dsb					
	Jumlah	705.695.000				705.695.000

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	<u>2.015.992.727,00</u>	<u>2.004.727.827,00</u>

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.015.992.727 dan Rp 2.004.727.827 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.16 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	7.805.000				7.805.000
2	Alat-alat Angkutan	853.197.327				853.197.327
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	10.000.000				10.000.000
4	Alat-alat Pertanian	0				0
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.096.975.500		11.264.900		1.108.240.400
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	36.750.000				36.750.000
7	Alat-alat Kedokteran	0				0
8	Alat-alat Laboratorium	0				0
9	Alat-alat Peralatan dan Keamanan	0				0
	Jumlah	2.004.727.827		11.264.900	0	2.015.992.727

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>671.622.000,00</u>	<u>671.622.000,00</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.17. Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	671.622.000,00	0	0,00		671.622.000,00
2	Monumen					
	Jumlah	671.622.000,00	0	0,00		671.622.000,00

Tidak ada perubahan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Aset Tetap Lainnya	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 650.000 dan Rp 650.000 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 3.18. Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2019	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Buku dan Pepustakaan					
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	650.000,00	-	-	-	650.000,00
3	Hewan Ternak dan Tanaman					
	Jumlah	650.000,00	-	-	-	650.000,00

Tidak ada perubahan saldo Aset Tetap Lainnya selama tahun 2020.

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	<u>242.123.880,00</u>	<u>264.523.840,00</u>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 242.123.880,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp 264.523.840,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.19 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
1	Tuntutan Ganti Rugi				
2	Aset Tak Berwujud	129.898.800,00	-	-	129.898.800,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(40.298.960,00)	(22.399.960,00)	-	(62.698.920,00)
4	Aset Lain lain	174.924.000,00	-	-	174.924.000,00
	Jumlah	264.523.840,00	(22.399.960,00)	-	242.123.880,00

Keterangan :

- a. Aset Tak Berwujud terdiri dari 2 unsur yaitu :
 - Hasil Kajian / Penelitian yang menghasilkan berupa Buku profil Analisis Statistik Gender seharga Rp. 17.899.000,-
 - Aplikasi dan Instalasi aplikasi e-voting (Aplikasi yang dipakai untuk pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa) seharga Rp. 111.999.800,-
- b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2019 senilai Rp. 40.298.960,- dan ada penambahan pada tahun 2020 senilai Rp. 22.399.960,- sehingga nilai akhir akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud senilai Rp. 62.698.920,-
- c. Aset Lain – Lain senilai Rp. 174.924.00,- merupakan aset dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengalami rusak berat, sehingga tidak dapat terpakai untuk operasional kantor.

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp 62.008.667,00 dan Rp 69.633.041,00 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	<u>62.008.667,00</u>	<u>69.633.041,00</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka

pendek per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Utang Belanja	<u>62.008.667,00</u>	<u>69.633.041,00</u>

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 62.008.667,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp 56.342.957,00 utang belanja jasa Rp 5.665.710,00 dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 0 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.20 Rincian Utang Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Utang Belanja pegawai	63.541.693,00	56.342.957,00	63.541.693,00	56.342.957,00
2	Utang Belanja Jasa	6.091.348,00	5.665.710,00	6.091.348,00	5.665.710,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
	Jumlah	69.633.041,00	62.008.667,00	69.633.041,00	62.008.667,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp 56.342.957,00 merupakan kewajiban atas kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 3.21 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2019	31 Des 2020
1	Utang Uang Makan	0	0	0	0
2	Utang TPP	63.541.693	56.342.957	63.541.693	56.342.957
3	Utang Perjalanan Dinas	0	0	0	0
	Jumlah	63.541.693	56.342.957	63.541.693	56.342.957

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.665.710,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.22 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2020
1	Jasa Telepon	59.680	41.660	59.680	41.660
2	Jasa Air	75.300	65.250	75.300	65.250
3	Jasa Listrik	1.782.368	1.404.300	1.782.368	1.404.300
4	Jasa Internet	4.174.000	4.154.500	4.174.000	4.154.500
	Jumlah	6.091.348	5.665.710	6.091.348	5.665.710

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	<u>1.606.380.021,59</u>	<u>1.815.353.200,97</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.23 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Jumlah Aset	1.668.388.688,59	1.884.986.241,97
2	Jumlah Kewajiban	62.008.667,00	69.633.041,00
3	Ekuitas (1(2))	1.606.380.021,59	1.815.353.200,97

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 3.24 Daftar Rincian Ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.815.353.200,97	1.815.353.200,97
2	Surplus (Defisit) LO	(6.077.495.773,38)	0,00
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	0,00	0,00
4	EKUITAS AKHIR	1.606.380.021,59	1.815.353.200,97

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	<u>2.373.000.395,00</u>	<u>2.456.991.573,00</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 1.25 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Belanja Gaji Pegawai LRA	2.380.199.131,00	2.456.439.217,00
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2020	00,0	
Tunjangan pegawai / TPP bulan Desember 2020 (utang belanja)	56.342.957,00	
Tunjangan pegawai / tunjangan uang makan 2019		63.541.693,00
DIKURANGI :		
Pembayaran utang beban pegawai bulan desember 2019	63.541.693,00	62.989.337,00
Pembayaran Kekurangan belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2018		0,00
Jumlah Belanja Pegawai LO	2.373.000.395,00	2.456.991.573,00

Tabel 3.26 Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	SKPD	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Lembur Belum di bayar	Utang Tunjangan Uang Makan	Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (PNS)	Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (Non PNS)	Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2019
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	56.342.957,00					56.342.957,00	
	Jumlah	56.342.957,00					56.342.957,00	

Beban pegawai meliputi Beban Tidak Langsung dan Beban Langsung. Beban pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk beban gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan beban pegawai – beban langsung merupakan pengeluaran beban pegawai yang terkait pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Tabel : 3.27 Rincian Beban Pegawai tahun 2020

No	Rincian Beban Pegawai	Beban 2020	Beban 2019
	Beban Tidak Langsung	2.283.895.145	2.260.293.073
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	1.195.791.123	1.178.561.813
2	Tunjangan keluarga	98.070.308	104.097.692
3	Tunjangan jabatan	137.455.000	150.030.000
4	Tunjangan fungsional umum	20.660.000	22.055.000
5	Tunjangan beras	54.097.740	53.590.800
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	2.087.391	2.789.184
7	Pembulatan gaji	14.627	15.389
8	Iuran Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	9.752.575	9.689.883
9	Tunjangan uang makan	0	0
10	Tambahan Penghasilan Pegawai	765.966.381	739.463.312
	Beban Langsung Pegawai		
1	Honorarium PNS	68.252.250	79.196.500
2	Honorarium Non PNS	0	40.500.000
3	Uang lembur PNS	20.853.000	77.002.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	89.105.250	196.698.500
	Jumah Belanja Pegawai	2.373.000.395	2.456.991.573

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	<u>3.474.667.957,00</u>	<u>4.351.657.622,00</u>

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.28 Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	632.137.082,00	1.381.392.749,00
2	Beban Jasa	2.250.271.782,00	1.895.312.723,00
3	Beban Pemeliharaan	92.230.165,00	113.020.784,00
4	Beban Perjalanan Dinas	500.028.928,00	960.961.366,00
5	Beban Lainnya	0,00	880.000,00
	Jumlah	3.474.667.957,00	4.351.657.622,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Beban Persediaan	<u>632.137.082,00</u>	<u>1.356.677.749,00</u>

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.29 Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Keterangan	2020	2019
1. Belanja Persediaan LRA	634.102.050,00	0,00
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	10.379.382,00	0,00
3. Beban persediaan 2019 yang masih harus di bayar	0,00	0,00
4. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3)	10.379.382,00	0,00
5. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+4)	644.481.432,00	0,00
Dikurangi		
6. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	12.344.350,00	0,00
7. Pembayaran utang belanja tahun lalu	0,00	0,00
8. Jumlah Pengurangan (6+7)	(12.344.350,00)	0,00
9. Beban Persediaan (5-8)	632.137.082,00	1.356.677.749,00

Tabel 3.30 Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban alat tulis kantor	52.948.150,00	62.788.000,00
2	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	4.829.000,00	4.953.000,00
3	Beban perangkat, materai, dan benda pos lainnya	4.437.000,00	6.066.000,00
4	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.940.450,00	4.985.750,00
5	Beban spanduk/baliho/banner	4.431.000,00	12.837.500,00
6	Beban Cinderamata	0,00	6.000.000,00
7	Beban Bahan Baku Praktek/Kegiatan	5.226.000,00	1.592.000,00
8	Beban Perlengkapan Praktek	1.786.000,00	23.205.000,00
9	Beban cetak	60.458.882,00	54.119.099,00
10	Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	20.338.400,00	65.438.400,00
11	Beban makanan dan minuman rapat	404.632.200,00	944.629.500,00
12	Beban makanan dan minuman tamu	4.869.500,00	3.172.500,00
13	Belanja pakaian olah raga	0,00	29.300.000,00
14	Belanja pakaian Batik Tradisional	0,00	21.000.000,00
15	Beban Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	0,00	0,00
16	Beban hadiah barang	0,00	6.470.000,00
17	Beban hadiah Uang	0,00	41.550.000,00
18	Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	63.240.500,00	68.570.000,00
19	Beban Taplak Meja	0,00	6.345.000,00
20	Beban Smart Card	0,00	18.370.000,00
	Jumlah Beban Persediaan	632.137.082,00	1.381.392.749,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	2.250.271.782,00	1.895.312.723,00

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2019 masing - masing sebesar Rp 2.250.271.782,00 dan Rp 1.895.312.723,00.

Tabel 3.31 Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban telepon	646.477,00	1.934.352,00
2	Beban air	1.160.300,00	2.542.200,00
3	Beban listrik	30.234.880,00	33.228.802,00
4	Beban surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.680.000,00
5	Beban kawat/faksimili/internet	50.082.761,00	36.164.607,00
6	Beban paket/pengiriman	90.210,00	9.512.120,00
7	Beban dokumentasi	3.036.000,00	0,00
8	Beban dekorasi	12.042.500,00	3.650.000,00
9	Beban Promosi / Publikasi / Advertising	5.600.000,00	49.088.000,00
10	Beban Jasa Gelombang Radio / Televisi	600.000,00	0,00
11	Beban penggantian transport	142.360.000,00	421.659.000,00
12	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	109.050.000,00	194.945.000,00
13	Beban jasa pendukung kegiatan	18.250.000,00	53.500.000,00
14	Beban jasa juri/wasit	0,00	8.100.000,00
15	Beban jasa event organizer	0,00	97.215.000,00
16	Beban jasa pembuatan video	0,00	1.000.000,00
17	Beban retribusi pelayanan persampahan	600.000,00	600.000,00
18	Beban Premi Asuransi Kesehatan	1.127.934.955,00	600.000,00
19	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	2.746.699,00	3.719.992,00
20	Beban sewa gedung/kantor/tempat	9.000.000,00	9.000.000,00
21	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	46.400.000,00
22	Beban sewa penginapan	0,00	3.380.000,00
23	Beban sewa sarana mobilitas darat	3.000.000,00	11.683.650,00
24	Beban sewa meja dan kursi	23.780.000,00	51.715.000,00
25	Beban sewa alat studio	2.500.000,00	32.600.000,00
26	Beban sewa tenda dan perlengkapannya	17.550.000,00	94.415.000,00
27	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	664.200.000,00	651.600.000,00
28	Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan	0,00	10.000.000,00
29	Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan	24.127.000,00	65.980.000,00

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
	Jumlah	2.250.271.782,00	1.895.312.723,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	<u>92.230.165,00</u>	<u>113.020.784,00</u>

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp92.230.165,00 dan Rp 113.020.784,00.

Tabel 3.32 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2019
dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	32.481.065,00	48.537.784,00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	18.101.500,00	22.108.000,00
3	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	7.979.600,00	5.840.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	0,00
5	Belanja pemeliharaan alat pendingin	4.500.000,00	4.500.000,00
6	Belanja pemeliharaan personal computer	8.750.000,00	10.450.000,00
7	Belanja pemeliharaan peralatan personal computer	7.500.000,00	7.485.000,00
8	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	9.918.000,00	14.100.000,00
	Jumlah	92.230.165,00	113.020.784,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	<u>500.028.928,00</u>	<u>960.961.366,00</u>

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

Tabel 3.33 Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

		<i>dalam rupiah</i>	
No	Beban Perjalanan Dinas	2020	2019
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	391.950.000,00	315.272.500,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	108.078.928,00	645.688.866,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	500.028.928,00	960.961.366,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)

(c) Beban Lainnya	<u>00,00</u>	<u>880.000,00</u>
--------------------------	--------------	-------------------

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 00,00 dan Rp 880.000,00 sebagai berikut.

Tabel 3.34 Daftar Beban Lainnya Tahun 2019 dan 2018

<i>dalam rupiah</i>			
No	Beban Lainnya	2020	2019
1	Beban Lainnya (Alat Rumah Tangga)	00,00	880.000,00
	Jumlah Beban Lainnya	00,00	880.000,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>229.827.421,38</u>	<u>253.607.703,09</u>

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 229.827.421,38 dan Rp 253.607.703,09 sebagai berikut.

Tabel 3.35 Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

<i>dalam rupiah</i>			
No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	195.472.565,93	208.357.835,88
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.954.895,45	22.849.907,21
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	207.427.461,38	231.207.743,09
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	22.399.960,00	22.399.960,00
	Jumlah	229.827.421,38	253.607.703,09

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00

dan Rp 0,00 tidak menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2019.

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	(0,00)	(0,00)

Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar (Rp 0,00) dan (Rp 0,00).

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	0,00	0,00

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 3.36 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	0,00	0,00
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0,00	0,00
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	1.815.353.200,97	1.815.353.200,97

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp 1.815.353.200,97 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp 1.815.353.200,97 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2018 *audited*.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
--	--------------------------	--------------------------

b. Surplus (Defisit) LO	(6.077.495.773,38)	0,00
-------------------------	--------------------	------

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d. Ekuitas Akhir	1.606.380.021,59	1.815.353.200,97

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.37 Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	1.815.353.200,97	1.815.353.200,97
2	Surplus (defisit) LO	(6.077.495.773,38)	0,00
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	1.606.380.021,59	1.815.353.200,97

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

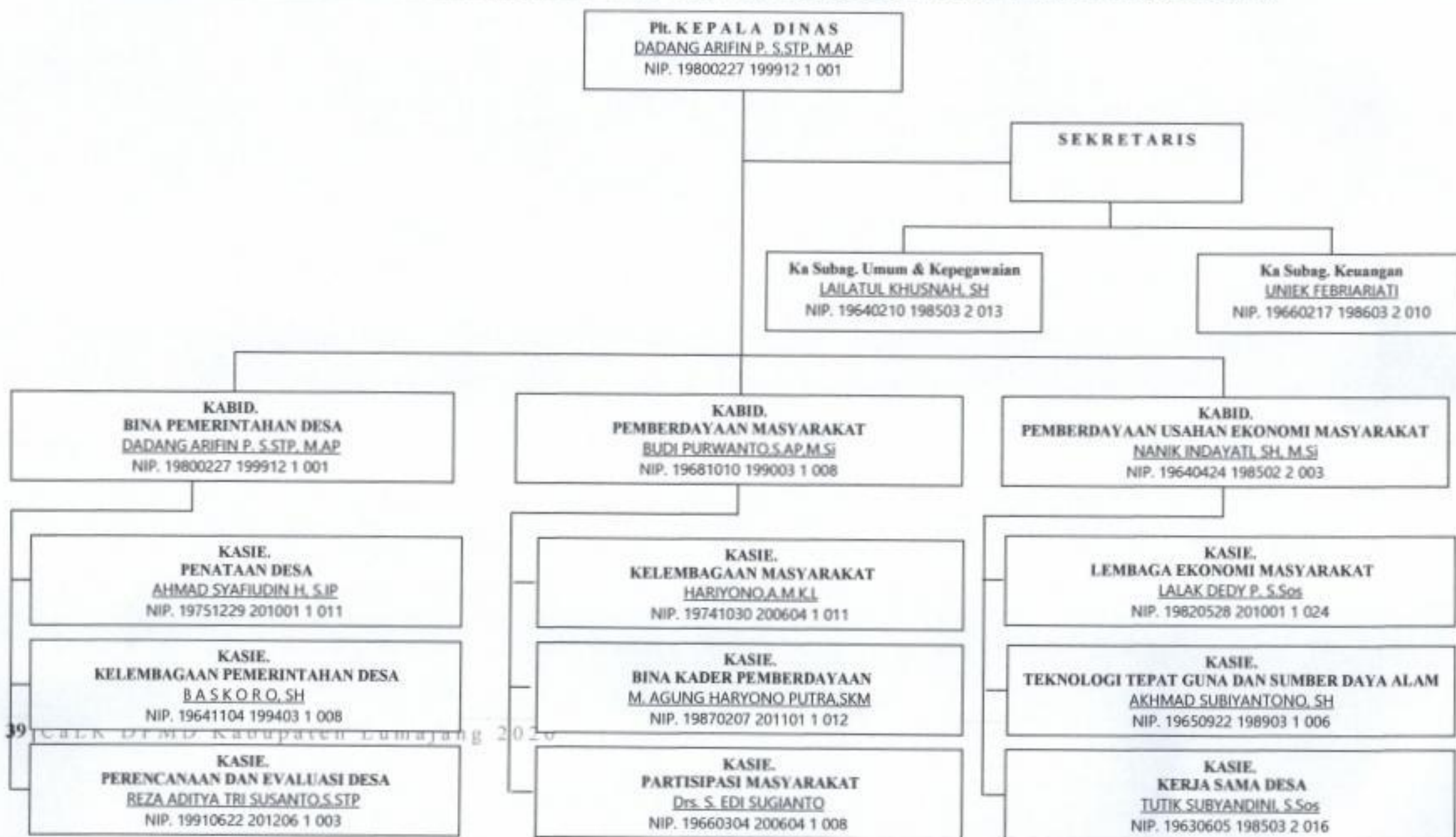
1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 10 Nopember 2016.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA PEJABAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAB. LUMAJANG PER 31 DESEMBER TAHUN 2020



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No 79 tahun 2016 Bab III Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

3.1. Tugas Pokok.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2. Fungsi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh SDM sebanyak 53 orang, dengan rincian sebagai berikut :

ASN : 21 orang

No	Nama / NIP	Jabatan
1	DADANG ARIFIN P., S.STP, M.AP	Plt.Kepala DPMD
	NIP. 19800227 199912 1 001	
		Sekretaris
2	NANIK INDAYATI, SH, M.Si	Kabid. Pemberdayaan Usaha
	NIP. 19640424 198502 2 003	Ekonomi Masyarakat
3	BUDI PURWANTO,S.AP,M.Si	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat
	NIP. 19681010 199003 1 008	
4	DADANG ARIFIN P., S.STP, M.AP	Kabid. Bina Pemerintahan Desa
	NIP. 19800227 199912 1 001	
5	LAILATUL KHUSNAH, SH	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	NIP.19640210 198503 2 012	
6	UNIEK FEBRIARIATI	Kasubag. Keuangan

	NIP. 196660217 198603 2 010	
7	M. AGUNG HARYONO P,SKM	Kasi. Bina Kader Pemberdayaan
	NIP. 19870207 201101 1 012	
8	HARYONO,A.M.K.L	Kasi. Kelembagaan Masyarakat
	NIP. 19741030 200604 1 011	
9	REZA ADITYA TRI S,S.STP	Kasi. Perencanaan dan Evaluasi Desa
	NIP. 19910622 201206 1 003	
10	AKHMAD SUBIYANTONO, SH	Kasi. Teknologi Tepat Guna & SDA
	NIP. 19650922 198903 1 006	
11	TUTIK SUBIYANDINI,S.Sos	Kasi. Kerja Sama Desa
	NIP. 19630605 198503 2 016	
12	Drs. S. EDI SUGIANTO	Kasi. Partisipasi Masyarakat
	NIP. 19660304 200604 1 008	
13	BASKORO,SH	Kasi. Kelembagaan Pemerintahan Desa
	NIP. 19641105 199403 1 008	
14	AHMAD SYAFIUDIN H, S.IP	Kasi. Penataan Desa
	NIP. 19751229 201001 1 011	
15	LALAK DEDY P, S.Sos	Kasi. Lembaga Ekonomi Masyarakat
	NIP. 19820528 201001 1 024	
16	SUPRIYANTI	Staf
	NIP. 19810726 201406 2 004	
17	NILA CHRISTANTI	Staf
	NIP. 19800218 2010012 010	
18	NANA RATIH MURASARI	Staf
	NIP. 19781011 201001 2 002	
19	SAIFUL	Staf
	NIP. 19651020 200701 1 016	
20	AGUS BUDIYANTO	Staf
	NIP. 19710427 200801 1 011	

21	HENDRIK ISMIANTO	
	NIP. 19800512 200901 1 004	

Tenaga Kontrak : 32 orang

NO	NAMA	JABATAN
BIDANG SEKRETARIAT		
1	ERDIANA,S.Ak	Tenaga Administrasi Keuangan
2	AMANDA PUTRI AYU W.S.Ak	Tenaga Administrasi Umum
3	ALFIYAH,SE	Tenaga Administrasi Keuangan
4	MISNARTI, SH	Tenaga Administrasi Keuangan
5	RISTYAN DWI DARMA YANTO,SE	Tenaga Administrasi Kepegawaian
6	MAULIDYA DWI AGUSTINA,S.Sos	Tenaga Administrasi Kepegawaian
7	MUKHAMAD ARISTA ADIPUTRA	Tenaga Administrasi Persuratan
8	ROSA DWI INDAH SARI,SE	Tenaga Administrasi Persuratan
9	ENDRA DWI PRANATA	Tenaga Kebersihan
BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA		
10	SYAHRUDIN NAJID,SE	Koordinator Kabupaten
11	ZULFICKAR AURIZKI,SE	Koordinator Kabupaten
12	DWI RAHAYU PRIHATINI,S.Pd	Koordinator Kabupaten
13	JATMIKO	Tenaga Administrasi
14	M. YUSUF AMHARI	Tenaga Administrasi
15	ACH. FAUZIHAN,S.M	Tenaga Administrasi
16	AKHDIYAT RIZKI A,S.P	Tenaga Administrasi
17	ARUM AGUSTIN M,S.P	Tenaga Administrasi
18	CAROLINA A	Tenaga Administrasi
19	DANANG KURNIAWAN,S.M	Tenaga Administrasi
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
20	EVI OKTAVIANA,S.AB	Tenaga Administrasi
21	ZULIA NIKYTA DEWI	Tenaga Administrasi
22	SRI AYU AMBARWATI,A.Md	Tenaga Administrasi
23	MUKHAMMAD ABDUL AZIZ	Tenaga Administrasi
24	YUNITA RACHMADIANA,S.AP	Tenaga Administrasi PKK Kabupaten
25	ENDRA DWI CANDRA,S.Pd	Tenaga Administrasi PKK Kabupaten
26	DESSY PURWANING DYAH,S.Pd	Tenaga Administrasi PKK Kabupaten
27	ANIK RACHMAWATI	Tenaga Administrasi PKK Kabupaten

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		
28	SITI NURUL WAHYUNI,S.Pd	Tenaga Administrasi
29	LIYASMI IKA HARJANA,S.E	Tenaga Administrasi
30	BOFIKIN DWI RY K.A,S.Pd	Tenaga Administrasi
31	RACHMAD WAHYU T,S.IP	Tenaga Administrasi
32	WIKAN SUKSMANTO, S.P	Tenaga Administrasi

Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1)	Pengguna Anggaran	DADANG ARIFIN P., S.STP, M.AP
2)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	AHMAD SYAFIUDIN,S.IP
3)	Bendahara Pengeluaran	SUPRIYANTI
4)	Bendahara Barang	NANA RATIH M.
5)	Kasir	AGUS BUDIYANTO
6)	PPK-SKPD Verifikasi	TUTIK SUBIYANDINI
7)	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	HARIYONO,A.M.K.L
8)	PPTK di Sekretariat	LAILATUL KHUSNAH,SH
9)	PPTK di Bidang Pemberdayaan M Masyarakat	BUDI PURWANTO,S.AP,M.Si
10)	PPTK di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	NANIK INDAYATI, SH, M.Si
11)	PPTK di Bidang Bina Pemerintahan Desa	DADANG ARIFIN P., S.STP, M.AP

VII. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2020 sebagai berikut :

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).

Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang :

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Desa Lumajang

Kewajiban-kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.

Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.

Laporan keuangan pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ; Laporan Operasional yang menginformasikan tentang Beban SKPD ; Laporan Perubahan Ekuitas yang menginformasikan tentang perubahan ekuitas selama satu tahun anggaran ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 31 Desember 2020 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca

Dari laporan realisasi anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :

Dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.696.228.724,00 terealisasi sebesar Rp. 5.868.522.594 atau 87,64 dari anggaran.

Dari Laporan Operasional diperoleh informasi sebagai berikut :

Beban pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.077.495.773,38

Dari Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh informasi sebagai berikut :

Pada Tahun 2020 Jumlah Ekuitas Awal Rp. 1.815.353.200,97 menjadi Ekuitas Akhir sebesar Rp. 1.606.380.021,59

Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :

Total aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 senilai Rp.1.413.920.458,59 yang sudah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan senilai Rp.-1.980.039.268,41

Kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 sebesar Rp. 62.008.667,00

Jumlah Kewajiban ditambah ekuitas atau kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.668.388.688,59

Lumajang, 31 Desember 2020

Pt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG
Penku Pengguna Anggaran/Barang



DADANG A PRESTIAWAN SSTP,MAP

NIP. 19800227 199912 1 001